

TINJAUAN YURIDIS ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENDAFTARAN TANAH

Oleh: Wahyu Hidayat* dan Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn.**

INTISARI

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga diselenggarakan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah. Dewasa ini pendaftaran tanah telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi melalui modernisasi pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perwujudan aspek teknologi informasi dalam pengaturan pendaftaran tanah sekaligus manfaat penerapan teknologi informasi dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dalam pendaftaran tanah diwujudkan dengan pembangunan Sistem Informasi Pertanahan/ SIP (LOC hingga KKP) yang memiliki 3 (tiga) unsur utama, yaitu ketersediaan basis data pendaftaran tanah; data spasial berbasis bidang tanah yang bergeoreferensi; dan prosedur serta metode pengumpulan, pembaruan, pemrosesan dan distribusi data kepada pengguna menggunakan cara yang efisien. Unsur-unsur tersebut diwujudkan dengan diterbitkannya 20 (dua puluh) peraturan perundangan-undangan yang tersebar pada berbagai tingkatan peraturan. Akan tetapi, materi pengaturan berbagai peraturan tersebut masih bersifat parsial. Sebagian besar hanya mengatur mengenai ketersediaan basis data pendaftaran serta sebagian kecil terkait prosedur/metode pengumpulan, pembaruan, pemrosesan dan distribusi data kepada pengguna menggunakan cara yang efisien. Sementara mengenai data spasial berbasis bidang tanah yang bergeoreferensi sama sekali belum diatur. Meskipun demikian, teknologi informasi dapat memberikan manfaat pada pendaftaran tanah utamanya memberikan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan pendaftaran tanah dan tersedianya informasi pertanahan dalam pangkalan data pertanahan yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan oleh berbagai pihak.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Teknologi Informasi, Sistem Informasi Pertanahan.

* Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1), Departemen Hukum Agraria, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

** Dosen Departemen Hukum Agraria, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

JURIDICAL REVIEW OF INFORMATION TECHNOLOGY ASPECTS IN LAND REGISTRATION

By: Wahyu Hidayat* and Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn.**

ABSTRACT

Land is one of the natural resources which is very important for the life of the Indonesian people so that land registration is held to ensure legal certainty and protection for land rights holders. Today land registration has adapted to the development of information technology through modernization of services. This research aims to analyze the embodiment of information technology aspects in land registration arrangements as well as the benefits of implementing information technology in land registration in Indonesia. This research is a normative juridical research, so the data used is secondary data. The results showed that information technology in land registration is realized by the development of Land Information System (LOC to KKP) which has 3 (three) main elements, namely the availability of a land registration database; spatial data based on georeferenced land parcels; and the procedures and methods for collecting, updating, processing and distributing data to users in an efficient manner. These elements are realized by the issuance of 20 (twenty) laws and regulations which are spread out at various levels of regulations. However, the material arrangements for these regulations are still partial. Most of them only regulate the availability of registration databases and a small part are related to the procedures / methods of collecting, updating, processing and distributing data to users using an efficient way. Meanwhile, the spatial data based on georeferenced land parcels has not been regulated at all. Nonetheless, information technology can provide benefits to land registration, primarily to provide efficiency and effectiveness of land registration implementation and the availability of land information in a land database that can be used for various purposes by various parties.

Key Words: Land Registration, Information Technology, Land Information System.

* Undergraduate Student of Agrarian Law Departement, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

** Lecturer of Agrarian Law Departement, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.